

RATU KEMALA SARI DAN PERDAGANGAN GELAP DI KALIMANTAN SELATAN PADA ABAD XIX MASEHI

Andi Nuralang*

Abstract

Ratu Kemala Sari is a well-known salt entrepreneur in the southeast region of Kalimantan. She is the spouse of Sultan Adam. In the 19th Century smuggling was one of the most troubling social phenomenon concerned by the sultanate and the people as well. Salt being the most important commodity at that time was also subject to smuggling. Why was salt considered valuable to be smuggled? How was the condition of trade monopoly in the southeastern part of Kalimantan? What was the relationship between Ratu Kemala Sari and smuggling in the southeastern part of Kalimantan? This article will discuss the position of Ratu Kemala Sari as a famous salt entrepreneur and her role as a leading figure for business, economics and politic in the southeastern part of Kalimantan, especially during the reign of Sultan Adam.

Kata kunci: garam, perdagangan, gelap, Ratu Kemala Sari, Belanda, monopoli.

A. Pengantar

Secara global, perdagangan gelap terjadi terutama karena kebijakan pelabuhan bebas Singapura (Poelinggomang, 2001). Sebab-sebab yang lain yakni terbatasnya komoditas permintaan penduduk dan lemahnya pengawasan pemerintah di masa itu. Di Kalimantan Selatan khususnya, perdagangan gelap terjadi disebabkan lemahnya sistem keamanan, longgarnya pengawasan dan keadaan geografis yang mendukung, yaitu banyaknya sungai-sungai kecil sebagai jalur lintas yang memudahkan untuk melarikan diri dari kejaran pengawas pemerintah. Memang sejak berabad-abad silam, Sungai Barito dengan anak-anak sungainya merupakan jaringan perdagangan maupun sosial-politik antara

pedalaman Kalimantan dengan daerah pantai yang memberi jalan terjalannya kontak dengan orang-orang luar Kalimantan (Daud 1997; Saleh 1983/1984). Karena itu, Sungai Barito sebagai sungai terbesar dan anak-anak sungainya di Kalimantan Selatan juga merupakan jalur utama penyelundupan.

Untuk mencegah semakin berkembangnya penyelundupan, Pemerintah Belanda dan Kesultanan Banjarmasin masa itu sudah melakukan berbagai upaya keamanan. Sayangnya, kedua pemerintah masih gagal menekan maraknya penyelundupan karena tidak memperhatikan faktor pungutan pajak yang masih terlalu tinggi dan belum menghapus hambatan berdagang agar harga barang lebih murah (Poelinggomang, 1996;

*) Penulis adalah Peneliti Muda pada Balai Arkeologi Banjarmasin, E-mail: anuralang_balarbjm@yahoo.com

Sulistyo, 1996; Leirizza, R.Z, 1971). Peristiwa serupa terjadi pula di tempat lain sebagai imbas perdagangan bebas. Selain pedagang Bugis-Makassar, penyelundupan juga dilakukan oleh pedagang Cina, bahkan di Kalimantan Selatan pedagang Banjar dan Cina berkolaborasi untuk menyelundupkan barang-barang dagangan yang laku di pasaran. Pemerintah sulit memberantas perdagangan illegal tersebut karena adanya anggota kerajaan yang ikut dalam penyelundupan.

Pada masa pemerintahan kolonial, golongan masyarakat Eropa mendominasi aspek politik maupun ekonomi. Disusul kemudian golongan Timur Asing, yaitu Cina, Arab dan lainnya. Masyarakat pribumi berada di lapisan paling bawah (Zuhdi, 2002). Sekilas melihat peta perpolitikan Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin abad XIX, tampak diwarnai dengan intrik istana dan campur tangan bangsa-bangsa Barat. Intrik di kalangan istana muncul dalam bentuk perselisihan antara ahli waris yang pantas dan memiliki turunan raja dalam memperebutkan tahta kerajaan. Potret sosio-politik ini dapat diketahui berdasarkan dokumen dan surat-surat perjanjian.

Profil Ratu Kemala Sari yang dikupas tulisan ini dalam konteks dinamika perdagangan di Kalimantan Selatan. Dari judul di atas sekurang-kurangnya akan menimbulkan pertanyaan: siapa Ratu Kemala Sari? Justru itu, tulisan ini akan juga menggambarkan sosok Ratu Kemala Sari dan kiprahnya dalam dunia perekonomian dan perpolitikan di Kalimantan Selatan, utamanya pada masa pemerintahan Sultan Adam dan masa-masa sesudahnya.

Berkaitan dengan perdagangan gelap, pembaca akan membayangkan pola ekonomi yang diliputi berbagai intrik atau monopoli di berbagai sektor. Garam merupakan salah satu komoditas yang mendapatkan perhatian serius dan menarik di Kalimantan Selatan pada masa lalu, sehingga muncul pertanyaan, mengapa garam menjadi komoditas perdagangan gelap (barang selundupan)? Apa hubungan Ratu Kemala Sari dengan perdagangan gelap di Kalimantan Selatan? Tulisan ini akan menguraikan kedua isu tersebut, selain eksistensi sosok Ratu Kemala Sari berdasarkan literatur-literatur dan beberapa hasil penelitian.

B. Ratu Kemala Sari dan Eksistensinya

Di kalangan istana Kesultanan Banjarmasin (peta 01), Ratu Kemala Sari merupakan usahawan wanita yang menguasai jalur perdagangan garam di Kalimantan Tenggara. Wanita ini disebut-sebut oleh sumber kolonial sebagai satu-satunya penghalang dan persoalan berat yang dihadapi pemerintah dalam persoalan garam. Ratu Kemala Sari sejak lama menguasai dan menjalankan usaha monopoli garam. Aktivitas perdagangan garamnya seringkali tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah, bahkan ia terus berupaya menuntut agar usaha monopoli garamnya berlangsung seperti sebelum perjanjian tahun 1825. Ambisinya dalam mempertahankan monopoli sukar dibendung sepanjang pertengahan abad XIX. Tentu saja hal ini merupakan persoalan besar karena ambisi itu berbenturan dengan keinginan kuat dari pihak

pemerintah untuk memonopoli garam (Subiyakto, 1999; Subiyakto, 2001; Usman, 1996).

Dalam peta perpolitikan dan perekonomian di Kalimantan Selatan Ratu Kemala Sari tidak asing lagi. Van Hengst dan hasil kutipan tersebut dari pendahulunya Residen A.M.E. Ondaatje (1836-1849) menggambarkan Ratu Kemala Sari bagi "macan" betina yang setiap saat siap menerjang siapapun yang menghalangi kemauannya, sekalipun dalam soal politik Kerajaan Banjar seperti dikutip berikut ini:

"...tidak banyak yang baik yang dapat dikatakan tentang istana; bahwa beban-beban berat, penghisapan dan penindasan yang dipikul rakyat adalah hasil dari keserakahan Ratu Kemala Sari akan uang; bahwa sifat-sifat buruknya telah umum diketahui ... tamak, ditakuti dan dibenci ... yang termasyur Ratu Kemala Sari ditakuti oleh rakyat sultan karena lapar kekuasaan dan serakah akan uang. Ia seluruhnya bertindak keras hanya untuk mendapatkan uang, rakyat harus menyerahkan berbagai macam pajak dan hasil penghisapan; ia umumnya dibenci, dan semuanya ingin ia mati. Ia memperlakukan sultan seperti anak kecil; ia merampok pangeran-pangeran lain (1836). Ratu Kemala Sari yang termasyhur yang kikir dan rakus akan uang dan kekuasaan hanya akan peduli akan dirinya dalam berbagai hal, terutama dalam masalah keuangan. Ia melakukan berbagai cara untuk mengeksploitasi rakyat, ia dibenci, semuanya ingin ia mati, ia pada umumnya ditakuti, tidak ada seorangpun yang berani menentanginya; tampaknya ia hanya takut pada pemerintahan Belanda. Uang adalah idolanya dan mengumpulkan harta adalah tujuannya..."

(Syamsuddin, 2001).

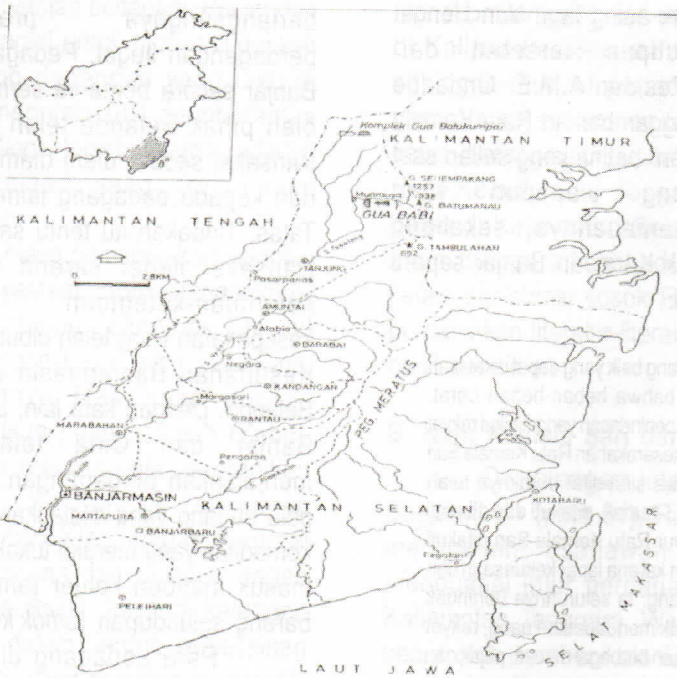
C. Ratu Kemala Sari dan Perdagangan Gelap

Sejak pertengahan Abad XVIII, wilayah Kesultanan Banjarmasin tampaknya telah menjadi daerah antara bagi berlangsungnya praktek-praktek perdagangan ilegal. Pedagang Cina dan Banjar secara bersama seringkali dituduh oleh pihak Belanda telah menjalankan transaksi secara diam-diam antarmereka dan kepada pedagang lainnya di daerah Tatas. Tindakan itu tentu saja merupakan transaksi ilegal karena tidak sesuai ketentuan-ketentuan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara pihak Kesultanan Banjarmasin dan Kompeni Belanda. Dengan kata lain, para pedagang Banjar dan Cina telah berkolusi menjalankan perdagangan gelap. Dalam pola dagang yang dijalankan semacam itu, komoditas yang mereka tukarkan, baik yang masuk maupun keluar tentu merupakan barang selundupan (*smok'kelgoed*).

Para pedagang di Banjarmasin sering mempunyai persediaan lada yang banyak, namun mereka tidak bersedia menyerahkannya kepada pihak kompeni sebagaimana seharusnya. Dalam porsi yang besar mereka memilih menyerahkan ladanya kepada pedagang dari daerah lain. Prosesnya melalui perahu-perahu sungai milik pedagang Banjar yang berisi penuh lada secara sembunyi-sembunyi dialih-muatkan ke kapal-kapal dagang dari daerah Nusantara lainnya yang kemudian mengangkutnya ke Jawa Timur, Trengganu ataupun Makassar. Beberapa pedagang Cina yang berani, bahkan nekad mengirimkan muatan lada ilegalnya dengan kapal-kapal kecil langsung ke

Batavia. Di Batavia mereka menjual lada dengan harga 6,25 real per pikul kepada para pedagang Jawa. Sekembalinya ke Banjarmasin, mereka membawa sejumlah

besar pakaian India, opium dan barang-barang Eropa untuk dijual kepada penduduk Kalimantan Selatan. (Goh Yoon Fong, 1969 : 226 dalam Subiyakto, 2001).



Gambar 01. Peta Kalimantan Selatan

Kebebasan dalam kegiatan pelayaran niaga mengalami kegoncangan ketika pedagang-pedagang Eropa mulai ikut terlibat dalam perdagangan di Asia Tenggara. Kegoncangan itu diawali pertama-tama oleh sikap permusuhan antara pedagang-pedagang Eropa sendiri: Portugis, Spanyol, dan Belanda. Wilayah perdagangan yang telah dikuasai oleh salah satu kelompok perdagangan Eropa dinyatakan tertutup bagi pedagang Eropa lainnya. Namun, dalam perkembangan kemudian berlaku juga bagi pedagang-pedagang dari kawasan tersebut khususnya

yang dilakukan oleh Perkumpulan Dagang India Timur, *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), suatu perkumpulan dagang Belanda. Prinsip laut tertutup (*mare closum*) dipandang sebagai cara untuk dapat memonopoli perdagangan.

Prinsip laut tertutup (*mare closum*) juga berlaku di Banjarmasin ketika perdagangan garam yang dilakukan Belanda mendapat tantangan dan persaingan dari Ratu Kemala Sari. Namun akhirnya Belanda berhasil menghambat penjualan garam ke pedalaman, khususnya di Kalimantan Tenggara sebagai daerah

perdagangan Ratu Kemala Sari. Garam, disamping tembakau, merupakan produk impor yang sangat dicari penduduk pedalaman Kalimantan Tenggara. Perahu dagang senantiasa mengusahakan agar dapat menyertakan muatan garam ke pedalaman bila hendak mendapatkan keuntungan besar. Memang, sejak lama garam di daerah Kalimantan Tenggara menjadi persoalan keperluan hidup masyarakat yang sangat sulit didapatkan.

Pada dasawarsa kedua abad XIX *Raad van Financien* mengusulkan agar pemerintah pusat di Batavia membantu persoalan garam yang dihadapi Kalimantan Tenggara dan demi mempertahankan pemerintahan serta menjalankan monopoli perdagangan. Garam merupakan komoditas yang dinilai sangat berharga, sehingga sangat pantas dimonopoli. Bahkan, untuk daerah Kalimantan Tenggara, barang-barang yang kurang diperlukan rakyat sekalipun, sebisanya dikuasai pemerintah. Berdasarkan kasus komoditas garam, Van der Kemp menggambarkan sifat monopoli pemerintah Belanda dan usaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (P.H. Van der Kemp, 1919 dalam Subiyakto, 1999).

Kasus yang terjadi tahun 1849-1850 bukanlah peristiwa kecil karena menyangkut garam ilegal dalam porsi besar. Sepanjang tahun itu, pemerintah Belanda berhasil menyita garam yang berusaha dimasukkan ke Banjarmasin secara ilegal oleh sedikitnya delapan perahu Bugis. Kasus ini cukup menarik karena diduga melibatkan seorang wanita yang memiliki kedudukan terhormat di lingkungan istana Banjarmasin, dialah Ratu Kemala Sari. Beliau adalah salah seorang

usahawan yang sejak lama menjalankan perdagangan garam. Sumber kolonial mencatat, bahwa salah satu agenda tugas pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan bagian Tenggara yang terberat adalah menyangkut persoalan Ratu Kemala Sari dengan aktivitas perdagangan garamnya yang sukar diselesaikan. (ANRI Bundel BZO No. 553 dalam Bambang Subiyakto, 1999).

Berdasarkan publikasi tanggal 11 Maret 1823 impor garam bagi Kalimantan Tenggara merupakan suatu sumber pendapatan baru yang menjanjikan dan sangat menguntungkan. Pengumuman itu menjadi petunjuk bahwa pemerintah Belanda tidak bermaksud mendatangkan garam ke sana semata-mata guna memenuhi kebutuhan hidup yang wajar dan murah bagi rakyat, melainkan untuk keuntungan mendapatkan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, selama abad sejak publikasi impor garam sampai dilaksanakannya penelitian rencana mendirikan Bank Kredit rakyat pada awal abad XX, para petualang seperti Nieuwenhuis pada akhir abad keXIX mencatat bahwa garam masih merupakan barang kebutuhan sehari-hari penduduk yang tidak mudah didapat dan harganya sangat tinggi. Keterbatasan persediaan garam itu diperkuat pula oleh adanya pembatasan-pembatasan import garam ke Kalimantan Tenggara oleh pemerintah Hindia Belanda. Pembatasan itu tentu saja diharapkan akan berdampak pada tetap tingginya harga garam. Rekomendasi tim survei mengenai persoalan garam kepada pihak bank atau pemerintah juga tidak menunjukkan sifat keberpihakan kepada rakyat dalam arti sesungguhnya, khususnya

kepada nelayan, melainkan berorientasi kepada keuntungan bagi bisnis pemerintah Belanda.

Pembatasan yang ketat terhadap impor garam bisa dilihat pula dari selisih mencolok antara permohonan para pemasok garam dan izin yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 6 Juni 1835. Direktur Produksi Negara dan Persediaan Umum di Banjarmasin mengajukan surat No. 20 kepada Residen yang isinya berupa daftar pemohon pengangkutan garam, sebagaimana pada tabel berikut ini:

No.	Pemohon	Satuan-Koyan
1.	Syekh Akhmad	50
2.	Ong Bing San	50
3.	Ting Tjung Lian	25
4.	Liem Tian Bie	50
5.	The Fang Lay	25
6.	Wahab	25
7.	Syekh Abdullah	25
8.	Tio Ting In	25
9.	IFC Schooheid	25
10.	Uwan	25
	Jumlah	325

Tanggal 17 Juli 1835 Residen Kalimantan bagian Tenggara mengeluarkan surat No. 88 yang menetapkan bahwa atas dasar ketentuan peraturan yang berlaku, maka para pemohon sebagaimana dimaksud dalam surat Direktur No. 20/1835 masing-masing pemohon diperkenankan memasok garam ke Banjarmasin sebanyak 17 *Koyan*. Dengan demikian, dari total 325 *Koyan* garam yang diminta, pemerintah Belanda hanya memenuhi sekitar 50%, yaitu 170 *Koyan*. Menurut Van Hoevel, di Banjarmasin

pada tahun 1850-an hanya tersedia garam sekitar 1000 *Koyan*, padahal untuk memenuhi kebutuhan di pedalaman diperlukan 1600 sampai 1800 *Koyan*. Minimnya persediaan menyebabkan tingginya harga garam di Kalimantan Tenggara, terutama bagian pedalaman. Tak heran jika seseorang yang mempunyai jiwa dagang berinisiatif untuk menjual garam ke tempat-tempat yang membutuhkan sebagaimana yang dilakukan oleh Ratu Kemala Sari, walaupun diketahui merupakan kegiatan yang mendapat tantangan dari pemerintah Belanda.

Operasi penyelundupan dan perdagangan gelap bukan hanya dilakukan di tempat yang jauh dari pusat kekuasaan, tetapi justru lebih marak di lingkungan yang dekat pusat pemerintahan Kesultanan Banjarmasin. Perahu-perahu yang menjalankan praktik illegal mudah sekali bersembunyi, berlindung, lari dan menghilang dari upaya-upaya penangkapan oleh kapal-kapal patroli pihak kesultanan maupun pemerintah Belanda. (Bandingkan pula pada Republik Indonesia, Kalimantan, 1953:160). Praktek perdagangan illegal tersebut didukung oleh keadaan lingkungan Kalimantan Selatan yang memiliki garis perairan sepanjang 3000 km tempat bermuara sungai besar dan kecil. Di samping itu, terdapat jalur-jalur air saling berhubungan, baik antar anak sungai maupun oleh terusan. Keadaan geografi lainnya yang mendukung praktek "perdagangan gelap", yaitu terdapat daerah kepulauan baik yang berpenghuni maupun tidak, serta yang spesifik terdapatnya pulau-pulau kecil tak berpenghuni di sungai besar seperti Barito dan Mahakam (Bambang Subiyakto, 1999).

Untuk mengatasi “perdagangan gelap”, pihak Kesultanan Banjarmasin dan pihak Belanda membuat perjanjian (kontrak) kerjasama untuk memperkuat keamanan wilayah, dengan masing-masing menyediakan perahu atau kapalnya untuk melakukan patroli bersama terhadap tindakan-tindakan ilegal di daerah perairan Kalimantan Selatan. Meskipun demikian, upaya kedua pemerintah belum mampu menjamin surutnya praktek penyelundupan dan “perdagangan gelap”. Di samping faktor geografi, maraknya praktek ilegal itu juga disebabkan oleh faktor manusianya. Para pelaku tidak jarang ternyata bukan dari kalangan pedagang biasa, melainkan justru melibatkan kepala-kepala pribumi setempat dan dari kalangan istana sendiri.

Keterlibatan kepala-kepala pribumi dan kalangan istana dalam “perdagangan gelap” dan selundupan disebabkan garam merupakan komoditas bernilai tinggi dalam sejarah Kalimantan Selatan. Dalam Abad XIX, garam merupakan salah satu jenis komoditas kebutuhan sehari-hari yang *teramat sulit didapatkan penduduk Kalimantan Selatan*, dengan harga mahal. Kelangkaan dipasaran, bukan karena ketiadaan garam atau kurangnya persediaan di daerah produsen di wilayah kesultanan Banjarmasin, melainkan disebabkan kebijakan pembatasan-pembatasan impor komoditas tersebut ke wilayah ini yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Akibat dari kebijakan itu dan dukungan faktor geografis, muncul “perdagangan gelap” dan penyelundupan untuk komoditas garam yang sangat menguntungkan pelakunya. Garam dari daerah produsen — seperti Jawa, Madura dan Sulawesi — pada dasarnya cukup

tersedia, sedangkan di lain pihak, daerah Kalimantan Selatan sebagai salah satu potensi pasarnya dibatasi, menyebabkan upaya penyelundupan komoditas itu tak terhindarkan.

Pembatasan impor garam oleh pemerintah Belanda pada waktu itu sama sekali tidak realistis dan jelas-jelas tidak mengacu kepada kepentingan rakyat pada umumnya. *Beleid* pemerintah dengan pembatasan impor yang ketat terhadap garam sengaja dijalankan guna menjaga stabilitas harga garam agar tetap tinggi, dan atas dasar monopoli pemerintah guna mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan sebagaimana tujuan implisit dikeluarkannya Publikasi 11 Maret 1823 pemerintah pusat di Batavia. Pada tahun 1850-an harga resmi dipatok pemerintah setempat f.7 per pikul. Kenyataan ini direspon oleh beberapa pedagang secara negatif dengan praktik penyelundupan dan dipasarkan secara gelap. Kelangkaan persediaan garam yang berlangsung di wilayah Kalimantan Selatan dengan demikian menyulut gairah beberapa pedagang untuk memasok garam secara ilegal. Bila berhasil, garam bisa dijual dengan harga tinggi dan tentu akan sangat menguntungkan.

D. Penutup.

Ratu Kemala Sari adalah istri Sultan Adam. Sultan Adam adalah seorang raja Kerajaan Banjar memerintah antara tahun 1825 – 1857. Ratu Kemala Sari salah satu sosok yang cukup disegani meskipun dibendung oleh pemerintah Belanda, namun tetap pada pendirian untuk melakukan perdagangan garam tanpa mengindahkan larangan dan pembatasan

bagi pemasok garam di Kalimantan Tenggara. Garam merupakan persoalan cukup menarik dalam sejarah Kalimantan Selatan, terutama karena menjadi komoditas "perdagangan gelap" dan barang selundupan. Justru itu, sampai dengan awal abad XX, garam merupakan komoditas yang bernilai ekonomis dan diperebutkan banyak orang di Kalimantan Selatan.

Secara matematis, pada tahun 1850-an hanya tersedia garam sekitar 1000 koyan, padahal untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya diperlukan 1600 sampai 1800 koyan. Minimnya persediaan menyebabkan tingginya harga garam. Siapa saja pasti tergiur untuk memperdagangkan komoditas tersebut entah melalui jalur legal maupun secara ilegal. Ratu Kemala Sari sebagai seorang pedagang melihat peluang tersebut, keberuntungan berpihak padanya karena beliau juga seorang istri raja yang berkuasa saat itu, operasi penyelundupan dan perdagangan gelap bukan hanya dilakukan ditempat yang jauh dari pusat kerajaan, tetapi justru lebih marak di lingkungan yang dekat dengan pusat pemerintahan. Penyelundup garam selain Ratu pun mudah sekali bersembunyi, berlindung, lari dan menghilang dari upaya-upaya penangkapan kapal-kapal patroli pihak kerajaan maupun pemerintah kolonial.

Keterlibatan kepala-kepala pribumi dan kalangan istana dalam hal ini (Ratu Kemala Sari) dalam "perdagangan gelap"

dan selundupan garam merupakan faktor Belanda semakin menyebarkan intrik-intriknya. Kelangkaan garam dipasaran, bukan karena ketiadaan garam atau kurangnya persediaan di daerah produsen di wilayah kesultanan Banjarmasin, melainkan disebabkan kebijakan pembatasan-pembatasan impor komoditas tersebut ke wilayah ini yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Akibat dari kebijakan itu dan dukungan faktor geografis, muncul "perdagangan gelap" dan penyelundupan untuk komoditas garam yang sangat menguntungkan pelakunya. Garam dari daerah produsen — seperti Jawa, Madura dan Sulawesi — pada dasarnya cukup tersedia, sedangkan di lain pihak, daerah Kalimantan Selatan sebagai salah satu potensi pasarnya dibatasi, menyebabkan upaya penyelundupan komoditas itu tak terhindarkan.

Di Kalimantan Selatan, "perdagangan gelap" pada dasarnya timbul karena empat faktor: (1) kebijakan pembatasan impor garam untuk mempertahankan stabilitas harga; (2) lemahnya sistem keamanan; (3) longgarnya pengawasan, bahkan tidak efektif, kendati penyelundupan terjadi tetapi pemerintah kurang peka terhadap keluhan dari masyarakat; dan (4) keadaan geografis yang mendukung, yaitu banyaknya sungai-sungai kecil yang menuju ke muara untuk bisa meloloskan diri dari pengawasan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Daud, Alfani. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka.
- Leirizza, R.Z. 1971. *Politik Perdagangan VOC di Maluku*. Jakarta: Lembaga Research Kebudayaan Nasional, LIPI terbitan tak berkala, Seri No. 1/ 9.
- Palinggomang, Edward. L. 2001. *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- _____, 1996. Transportasi dan Jaringan Perdagangan di Kawasan Indonesia Bagian Timur pada Periode Kolonial, *Bulletin Somba Opu*, No. 2 Th 1. Makassar: SPSP Sulselra.
- Saleh, Idwar. 1983/1984. *Sekilas mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya sampai dengan Akhir Abad ke-19*. Banjarbaru: Museum Negeri Lambung Mangkurat.
- Sjamsuddin, Helius. 2001. *Pegustian dan Temenggung Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subiyakto, Bambang. 1999. *Pelayaran Sungai di Kalimantan Tenggara: Tinjauan Historis Tentang Transportasi Air Abad XIX*. Tesis Program Pascasarjana UGM. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Subiyakto, Bambang. 2001. *Perompakan: Sebuah Realitas Historis Abad XIX di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Kerjasama LPKPK, Forum 24, Pemerintah Kota dan DPRD Kota Banjarmasin.
- Sulistyo, Bambang. 1996. *Perdagangan Bebas di Makassar pada Abad XIX: Tinjauan dari Dimensi Sosial Politik, Bulletin Somba Opu*, No.2 Th 1. Makassar: SPSP Sulselra
- Usman, Gazali. 1996. *Kerajaan Banjar, Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi, Perdagangan dan Agama Islam*. Banjarmasin: Unlam Press.
- Zuhdi, Susanto. 2001. *Cilacap (1830 – 1942) Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.